

Kolaborasi Pemerintahan Dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kampung Debegan
Kelurahan Mojosongo

*Collaborative Governance In The Slum-Free City Program in Debegan Village,
Mojosongo city Surakarta*

Eka Putri Dhamastuti⁽¹⁾, Dr. Drs. Suwardi, M. Si⁽²⁾, Dra. Sri Riris Sugiyarti, M. Si⁽³⁾

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet
Riyadi Surakarta

ekputri105@gmail.com

Abstrak

Collaborative Governance sangat penting dalam mengoptimalkan kebijakan pemerintah baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam implementasi kebijakan. Begitu pula dalam upaya menjalankan program Kota Tanpa Kumuh di pemerintah kota Solo khususnya di Kampung Debegan Kelurahan Mojosongo juga membutuhkan dan menerapkan langkah bersama dalam wujud *Collaborative Governance*. Teori yang digunakan dalam penelitian *collaborative governance* ini berdasarkan teori Ansell and Gash (2007:228) yang menggunakan 5 (lima) indikator terbentuknya *collaborative governance* yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat yakni, *Face to Face Dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to process*, *Shared Understanding* dan *Intermediated Outcomes*. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Instrumen yang di pilih Secara purposive sampling yaitu dinas terkait program KOTAKU di Kampung Debegan, mulai dari penggerak Kampung, Kelurahan, Dinas Pemadaman Kebakaran, Dinas Perumahan dan Dinas Lingkungan Hidup serta kedinasa lainnya yang tidak di sebutkan. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis yang di gunakan menggunakan teori dari Miles Huberman (2014) yakni teknik analisis interaktif (penyajian data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses *Collaborative Governance* pada pelaksanaan Program KOTAKU di Kampung Debegan Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa catatan dan kekurangan. Hal ini dapat terlihat dari terlaksananya 5 indikator yakni *Face to Face Dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to the Process*, *Shared Understanding* and *Intermediated Outcomes*. Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kampung Debegan Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta berjalan dengan lancar, di mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan.

Kata kunci : *Collaborative Governance*, Program KOTAKU,

Abstract

Collaborative Governance is very important in Optimizing government policies both in policy making and in policy implementation. Similarly, in an effort to run the Kota Tanpa Kumuh program in the Solo city government, especially in Debean Village, Mojosongo Village, it also requires and implements joint steps in the form of Collaborative Governance. The theory used in this collaborative governance research is based on the theory of Ansell and Gash (2007: 228) which uses 5 (five) indicators of the formation of collaborative governance established by the government, the private sector and the community, namely, Face to Face Dialogue from planning to evaluation, Trust Building, Commitment to process, Shared Understanding and Intermediated Outcomes. The method used is qualitative. The informants selected by survey sampling are the offices related to the KOTAKU program in Debean village, from village mobilizers, sub-districts, the Fire Department, the Housing Office and the Environmental Service and other offices that are not mentioned. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The analysis techniques used use the theory of Miles and Huberman (2014), namely interactive analysis techniques (data presentation). The results showed that the Collaborative Governance Process in the implementation of the KOTAKU Program in Debean Village, Mojosongo Village, Surakarta City has been running well even though there are several notes and shortcomings. This can be seen from the implementation of 5 indicators, namely Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to the Process, Shared Understanding and Intermediated Outcomes.

Keywords: : Collaborative Governance, KOTAKU Programs,

A. PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menjadikan urbanisasi sebagai tindakan yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan munculnya permukiman illegal di perkotaan. (Sarwoko, 2016). Permukiman kumuh menjadi salah satu permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat perkotaan yang harus diselesaikan.

Hal yang ini terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk terpadat keempat setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa dengan luas wilayah 1.916.862,20 km² (BPS, statistik Indonesia (*Statistical Yearbook of Indonesia*), 2018). Kepadatan penduduk di perkotaan memunculkan permasalahan salah satunya adalah permukiman kumuh. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, data di Indonesia mengenai permukiman kumuh mencapai 38.431 hektar yang tersebar di 2.883 kawasan yang terbagi atas 515 kabupaten/kota diseluruh Indonesia (Kosasih, 2015). Di sisi lain, permukiman kumuh juga disebabkan adanya tingkat kemiskinan di perkotaan, dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, serta keterbatasan.

Program Kota Tanpa Kumuh adalah sebuah program nasional dalam penanganan permukiman kumuh yang diselenggarakan di 271 kabupaten atau kota di 34 provinsi, dimana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini menggunakan platform kolaborasi dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Panduan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), 2015). Adanya platform ini diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2015-2019 yakni kota tanpa kumuh. Program KOTAKU mempunyai tujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur serta pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dalam mendorong terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, permukiman yang sehat, produktif dan berkelanjutan.

Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres merupakan salah satu Kelurahan diantara 51 Kelurahan yang ada di Kota Surakarta.. Letak geografis Kelurahan Mojosongo antara 100BT - 111BT dan berada pada ketinggian 80- 130 diatas permukaan laut. Luas wilayah di Kelurahan Mojosongo termasuk

wilayah yang luas dibandingkan dengan Kelurahan yang ada di Kecamatan Jebres lainnya, yakni 532,927 Ha.

Partisipasi masyarakat kampung Debean dalam kontribusinya mengsucceskan program Kota Tanpa Kumuh terwakili oleh partisipasi aktif dari ibu-ibu PKK, berdasarkan survey awal kampung Debean adanya kegiatan darwisian ibu-ibu PKK mampu mendongkrak perekonomian keluarga dan kebersihan lingkungan, hal ini terwujud bermula adanya ide dari ibu-ibu PKK mengagask sampah terpisah setiap rumah yang di dapatkan dari CSR perusahaan dan pelaku usahasekitar kampung debegan. Hasilnya berupa 30 bak sampah di manfaatkan warga sebagai upaya kota bersih tanpa sampah, hal ini merupakan langkah kecil mendorong dan mensucceskan program Kota Tanpa Kumuh di kota Surakarta

Berdasarkan Laporan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RK-KP) tahun 2015 posisi kelurahan mojosongo menemepati urutan kawan terkumuh Nomor 6 di kota surakarta, namun ada satu hal yang membuatnya menonjol yakni dari semua kawasan dan kelurahan yang menjadi fokus program Kota Tanpa Kumuh di Solo, Kelurahan Mojosongo adalah satu-satunya

kekumuhan yang terjadi di lingkup kampung, yang notabene perkampung identik dengan asri dan nyaman, oleh sebab itu kemudian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mendalami lebih detail tentang apa yang terjadi dan apa saja yang diupayakan sampai sejauh ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Proses *Collaboration Governance* Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta ?
2. Bagaimana Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis langkah-langkah Proses *Collaboration Governance* Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kampung Debean Kelurahan Mojosongo
2. Untuk menganalisis Pelaksanaan *Collaborative*

Governance Dalam
Program Kota Tanpa
Kumuh Di Kampung
Debegan Kelurahan
Mojosongo Kota
Surakarta

D. Materi dan Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yakni cara berpikir secara kritis dan mendalam terhadap suatu fenomena ataupun fakta sosial melalui pengamatan di lapangan, dan kemudian dianalisis (Bungin, 2007). Sementara itu untuk menggali data secara mendalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang sering sekali digunakan dalam bentuk penelitian sosial

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana teknik ini memilih informan yang dianggap mempunyai pengetahuan dan lebih mengerti mengenai keadaan atau program yang terkait dengan obyek penelitian.

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan

data kedalam kategori, menjabar ke unit-unit, menyusun pola, memilih data yang akan digunakan serta membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016). Terkait dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif (Penyajian Data)

E. Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan proses *collaboration governance* dalam program kota tanpa kumuh di Kampung Debegan Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta termuat lima (5) indikator utama yakni *Face To Face* (Dialog tatap muka dari perencanaan sampai evaluasi), *Trust Building* (Membangun saling kepercayaan satu dengan lainnya), *Comitmen To Proses process* (Komitmen terhadap proses), *Share Understanding* (Saling Mamahami) dan *Intermediated Outcomes* (hasil akhir yang di capai).

Hasil yang nyata dari Program KOTAKU adalah di RW 7 Kampung debegan. RW ini sudah berhasil dalam proses penataan kawasan, dimana semua indikator wilayah kumuh dipenuhi untuk diwujudkan menjadi indikator yang seharusnya, yakni kawasan permukiman yang layak huni sesuai dengan standar teknis yang diberlakukan. Berikut ini merupakan tabel yang

menyajikan pengurangan wilayah kumuh di Kampung Debean adalah sebagai berikut :

Tabel Hasil Pengurangan Wilayah Kumuh di Kampung Debean

Rerata Aspek	Persen (%)	
	Kondisi Awal (Baseline)	Kondisi Akhir
Kondisi Bangunan Gedung	16,26	15,55
Kondisi Jalan Lingkungan	51,27	41,00
Kondisi Penyediaan Air Minum	2,86	2,79
Kondisi Drainase Lingkungan	51,23	40,38
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	26,05	21,41
Kondisi Pengelolaan Persampahan	99,50	46,25
Kondisi Proteksi Kebakaran	73,91	36,31

Sumber: Data olahan Hasil verifikasi terakhir dokumen RKKP

Kawasan yang dinyatakan kumuh. Dari masing-masing indikator tersebut terdapat skor dalam prosentase mengenai kondisi awal sebelum adanya Program KOTAKU di implementasikan, setiap indikator, dikaji dan diprosentasikan dari kondisi awal

wilayah yang sesuai dengan indikator. Dari masing-masing indikator mengalami penurunan meskipun tidak langsung dalam jumlah banyak, tetapi untuk hasil sementara sudah ada di RW 7 sebagai contoh penataan lingkungan dalam Program KOTAKU.

Jadi untuk intermediated *outcomes* atau hasil sementara dari pelaksanaan program sudah terlaksana meskipun dalam penanganan untuk beberapa indikator yang lain belum terpenuhi tetapi masih dalam proses penataan dan perbaikan. Bahwa di RW 7 sudah ada taman yang dibangun, hal ini juga sudah memenuhi indikator keterbukaan ruang publik sesuai dengan salah satu indikator dari permukiman kumuh. Jadi dalam implementasinya Program KOTAKU sudah ada output yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kampung Debean.

Demi mengusung tujuan bersama antara para pihak dalam hal ini ialah Pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkan program KOTAKU sukses di kampung Debean pada 2020 lalu, dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan dan memaksimalkan proses kerjasama atau *colaboration governance*. Adapun tahap pelaksanaan *collaboration governance* yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Kota Surakarta terbagi menjadi 4 tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Perencanaan
3. Tahap Pelaksanaan
4. Tahap Keberlanjutan

Kolaborasi tidak terlepas dari peran aktor yang terlibat didalamnya. Terkait dengan *stakeholder* tersebut, masing-masing pihak mempunyai peranannya masing-masing dalam kontribusinya di Program KOTAKU yang diselenggarakan di Kampung Debean

Sebuah kolaborasi ini terjadi karena adanya bentuk kerjasama melalui perjanjian atau MOU yang sudah disepakati bersama-sama, dalam hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi itu terjadi tidak hanya terjadi dari pihak pemerintah atau masyarakat saja melainkan peran dari swasta juga sangat mendukung berjalannya proses kolaborasi.

Kolaborasi yang dilakukan ini mencakup beberapa pihak yang berasal dari pemerintah, masyarakat ataupun swasta. Kolaborasi ini dilakukan sebagai wadah untuk saling melengkapi kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh beberapa pihak yang terlibat didalam kolaborasi.

Sesuai dengan *platform* Program KOTAKU, kolaborasi ini sudah dilakukan dalam implementasinya di Kampung Debean selain itu sebagai bentuk pertanggung jawabannya semua pihak yang sudah menandatangani surat perjanjian harus bertanggung jawab kepada Walikota, karena dalam Program KOTAKU Walikota sebagai pemegang

kendali.

Selanjutnya proses kolaborasi itu mulai dilakukan dari awal merancang bahwa adanya Program KOTAKU BAPPEDA dan seluruh OPD melakukan rapat koordinasi dengan adanya rapat tersebut adanya keterbukaan informasi sangat dibutuhkan, karena dalam menangani permukiman kumuh itu sangat kompleks jadi diharapkan adanya rapat koordinasi ini hasilnya nanti bisa menentukan kira-kira pihak siapa saja yang harus terlibat dalam penanganan permukiman kumuh ini melalui Program KOTAKU.

Setelah hasil rapat itu diumumkan maka terdapat beberapa *stakeholder* yang terlibat yakni, dari pihak pemerintah meliputi BAPPEDA, seluruh OPD khususnya Dinas Permukiman, Koordinator KOTAKU, Fasilitator Kelurahan, Kampung Debean, sedangkan dari masyarakat sebagai perwakilan adalah Ketua LKM Kampung Debean, dan dari pihak swasta adalah Perum PERUMNAS dan Real Estat Indonesia Solo Raya.

Proses kolaborasi ini akan dipetakan untuk masing-masing perannya dalam kerjasama membantu mengatasi masalah permukiman di Kampung Debean. Tidak hanya itu saja, adanya kolaborasi yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam membantu untuk mencapai target 0 persen bebas wilayah kumuh, semua *stakeholder* yang terlibat harus bekerja bersama untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama.

masing-masing *stakeholder* tentunya memiliki peran masing-masing dan juga peran dalam proses kolaborasinya. Pelaksanaan dan analisis peran *stakeholder* dalam tahapan Program KOTAKU sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan langkah awal dalam membangun kolaborasi dengan menyelaraskan dan menyamakan visi dan misi yang akan dicapai dalam beberapa tahun kedepan. Tahap ini dijadikan sebagai dasar tersusunnya dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Di tingkat kabupaten/kota tahap persiapan meliputi:

- a. Penyepakatan MoU antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi Program KOTAKU.
- b. Lokakarya Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan antar lintas dinas untuk memberikan informasi mengenai adanya program KOTAKU di Kota Surakarta.

- c. Pembentukan atau Penguatan Pokja Penanganan

Permukiman kumuh Kelompok kerja yang dibentuk ini disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan dalam program, termasuk dalam pokja ini menyangkut mengenai beberapa *stakeholder* yang mempunyai kemampuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan saat program di implementasikan.

d. Komitmen Penyusunan Dokumen RP2KP-KP

Dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh ditingkat kota berjangka 5 tahun, membangun komitmen multi aktor dan multisektor, dalam dokumen ini disusun oleh pemerintah kabupaten atau kota, pokja PKP, dengan melibatkan masyarakat dan didukung oleh tenaga ahli perencanaan kota. Bukti salah satu MoU kerjasama antara OPD yang terlibat kolaborasi dengan pihak PDAM

2. Tahap Perencanaan

Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan sumber data dan informasi dari berbagai sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan. Maka dari itu, perencanaan ini sebagai kunci

utama dalam memecahkan masalah bersama dalam membangun komitmen para pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh.

Tahap perencanaan tingkat kota menghasilkan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan RP2KP-KP dan Rencana atau desain kawasan yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan ditangani. Tahap perencanaan meliputi:

- a. Persiapan perencanaan
- b. Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) RPLP adalah dokumen rencana penataan lingkungan permukiman tingkat kelurahan atau desa yang disusun oleh masyarakat yang damping oleh pemerintah daerah, fasilitator.
- c. Penyusunan Rencana Detil/Teknis Pelaksanaan perencanaan teknis dalam mekanisme kegiatan skala lingkungan KOTAKU merupakan kegiatan lanjutan dari tahapan perencanaan penyusunan Rencana Penataan Lingkungan

Permukiman (RPLP). Perencanaan Teknis adalah penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED) dari prioritas rencana tahunan RPLP itu sendiri.

Tahap ini menyangkut aspek koordinasi yang dilakukan dari pihak pemerintah daerah, aspek koordinasi pembangunan tersebut yakni: pembagian fungsi yang lebih jelas pada masing-masing instansi untuk terhindar dari adnaya fungsi yang bercampur; meningkatkan peran BAPPPEDA yang mengkoordinasikan berbagai instansi sectoral sesuai dengan pembangunan. Sebelum kolaborasi yang dilakukan, para OPD melakukan rapat koordiinasi, dimana rapat ini membahas mengenai berbagai keperluan dan kebutuhan selama penyelenggaraan program.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap implementasi ini baik kegiatan sosial, ekonomi ataupun infrastruktur, pelaksanaan Program KOTAKU dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan termasuk dengan mempertimbangkan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dalam Program

KOTAKU berpotensi akan menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial, maka dari itu di perlukannya upaya pengelolaan dampak dan memastikan kelayakan kegiatan yang direncanakan. Jadi, dalam proses kolaborasi ini awalnya adalah persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan walikota yang dalam hal ini adalah BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Permukiman Kawasan Permukiman, Tim Koordinator KOTAKU, Kampung debegan, dari masyarakat ada LKM dan dari swasta ad areal estat Indonesia Solo Raya yang bekerja dalam dunia property perumahan dan juga Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional. Dari hasil rapat koordinasi tersebut akhirnya menentukan pihak siapa saja yang akan terlibat khususnya dari pihak swasta, ketika semua sudah bertemu dalam forum dan melakukan rapat untuk semua pihak yang terlibat baik dinas, swasta, akhirnya ada penentuan untuk menangani permukiman kumuh yang telah menjadi prioritas yakni di Kampung Debean

Tim Koordinator KOTAKU juga memiliki

Fasilitator Kelurahan, fasilitator ini bertugas untuk membantu masyarakat dalam menyusun agenda bersama dilingkungan, fasilitator harus mampu beradaptasi dengan bijak untuk mendampingi masyarakat. Visinya mennagani kawasan kumuh dan melakukan pencegahan di titik yang sudah terdeleniasi kumuh, dan juga harus mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dengan masyarakat terdampak. Setelah adanya kesepakatan bersama baik dari pemerintah Daerah dengan kepala kelurahan , akhirnya program KOTAKU bisa di lakukan dengan berbagai prosedurnya melalui LKM, sedangkan LKM itu membentuk panitia kerja untuk melakukan berbagai kegiatan yang telah sesuai dengan rencana dari Program KOTAKU yang telah disesuaikan dengan indikator permukiman kumuh.

1. Tahap Keberlanjutan

Tahap ini merupakan tahap setelah dilakukannya pelaksanaan program di lapangan yang telah dilakukan. Tahap ini didalamnya terdapat monitoring dan evaluasi. Upaya keberlanjutan program dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerapan aturan bersama pencegahan kumuh dan operasional pemeliharaan sarana dan Prasarana
 - Aturan bersama adalah

sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat sebagai pengendalian, pengawasan dan evaluasi bagi hasil perencanaan yang telah direncanakan bersama-sama, sehingga perencanaan yang dibuat dalam Dokemen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kampung debegan menjadiberlanjut dan memberikan hasil yang efektif untuk pengembangan secara keseluruhan. Kesepakatan-kesepakatan yang akan diatur dalam bentuk Aturan Bersama (AB) dilihat berdasarkan enam aspek antara lain:

- 1) Kesepakatan dari sisi tata ruang
- 2) Kesepakatan dari sisi perumahan bangunan
- 3) Kesepakatan dari sisi Sarana & prasarana
- 4) Kesepakatan dari sisi Ekonomi

Sedangkan Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam skala kelurahan adalah ketentuan yang telah disepakati masyarakat sebagai alat untuk mendorong kemandirian masyarakat bersama pemerintah, hal ini sangat penting dalam rangka membangun komitmen, kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan bersama yang telah disepakati dalam meningkatkan kualitas lingkunganpermukiman.

F. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa

- Proses *Collaborative Governance* pada pelaksanaan Program KOTAKU di Kampung Debegan Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa catatan dan kekurangan., Hal ini dapat terlihat dari terlaksananya 5 indikator yang dikembangkan Ansell and Gash (2007:228) yaitu *Face To Face, Trust Building,Comitmen To Proses,Share Understanding* dan *Intermediated Outcomes*.
- Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kampung Debegan Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta berjalan dengan lancar , dan segala kendala yang terjadi selama kegiatan program dalam tertangani dengan baik. tahapan yang dilakukan pada saat

pelaksanaan program KOTAKU meliputi 4 tahap, yaitu :

- Tahap persiapan
- Tahap perencanaan,
- Tahap pelaksanaan
- Tahap keberlanjutan.

Selain dari tahapan pelaksanaan program juga adanya program yang sudah terlaksana, diantaranya berupa pentaan ulang tembok pemukiman, pembangaunan saluran drainase sabuk tanggul dan jalan beton, pembangunan balai warga dan taman kampung, penyambungan irigrasi utama kampung ke sungai bengawan soloserta penataan korideor debegan seperti jalan paving dan gapuro masuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Ardiansyah. (2017). *Kebijakan Pengentasan Wilayah Kumuh (Studi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Tanjungpinang)*. Hal 1- 19.
- Munawaroh, K. (2016). Koordinasi Multistakeholder dalam Proses Rekrutmen Buruh Migran Asal Kabupaten Lampung Timur. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Nisanth, M., & Rajeev, D. (2015). Urban Governance and Slum issue in Kollam Corporation (Kerala State): A case Study from an Indian State. *International Journal of Advanced Research*, 3(5,801-811).
- Rakyat, K. P. (2012). *Buku Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)*. In D. B. Kawasan. Jakarta Selatan: Kementerian Perumahan Rakyat.
- Sobandi, R., & Sudarmadji, N. (2015). Knowledge sharing and stakeholder collaboration practice in solo city planning and development: Notes on

- urban community
nurturing
processes. *Procedia-Social
and Behavioral
Sciences*, 184, 161-170..
- Statistik, B. P. (2017). Survey
sosial ekonomi
nasional, Badan Pusat
Statistik.Syafri, W.
(2020). *Studi Tentang
Administrasi Publik*.
Jakarta : Erlangga.
- ST Sabaris, D. S. R. (2018).
Pelaksanaan Program
Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) di Jawa
Tengah.Fitriana, B. M.
(2018). Kolaborasi Dalam
Penanganan Permukiman
Kumuh Melalui Program
Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) Di Kelurahan
Sukaramai Kecamatan
Pekanbaru Kota. *JOM
FISIP* , 5(Collaboration,
slum Area, KOTAKU
Program), 1-17.
- Supriyatno, B. (2014). Role of
government in Jakarta
organize slum
area. *Scientific Research
Journal (SCIRJ)*, 2(5), 49-
57..
- Wang, S. (2014). Research on the
collaborative governance
model in the charity
organization under
polycentric
perspective. *Open Journal
of Social Sciences*, 2(09),
263. Organization under
Polycentric Perspective .
*Open Journal of Social
Sciences*, 2(Scientific
Research), 263-269.

